



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109/B.04/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran angka II huruf c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Gubernur menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021, peta jalan dan rencana aksi disusun dengan strategi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/93/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung;

4. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 500/5713/Bangda tanggal 13 Desember 2021 Hal Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Periode Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024.**

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi setiap Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Provinsi Lampung dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pelaksana Tugas Harian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109 /B.04/HK/2022
TANGGAL : 9-2-2022

PETA JALAN

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2022-2024

No	Strategi Kunci	Program Strategis	Sub Program	Timeline			PIC
				2022	2023	2024	
1.	Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	Menjaga volatilitas nilai tukar ★	Max 15%	Max 15%	Max 10%	Bank Indonesia
			Penyaluran Bantuan Sosial BPNT	Pada tahun 2021 KPM Penerima Program Sembako berjumlah 616.698 KPM, dengan estimasi kenaikan jumlah penerima sembako tahun 2022 berjumlah 709.202 KPM dengan adanya di 8 Kabupaten/Kota di tetapkan kemiskinan ekstrim.	Estimasi kenaikan penerima sembako tahun 2023 berjumlah 709.202 KPM, sebelumnya ditahun 2021 KPM Penerima Program Sembako berjumlah 616.698 KPM. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya di 8 Kabupaten/Kota di tetapkan kemiskinan ekstrim.	Pada tahun 2024 estimasi kenaikan penerima sembako berjumlah 678.367 KPM dari sebelumnya di tahun 2021 KPM penerima program sembako yang berjumlah 616.698 KPM. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya 8 Kabupaten/Kota yang ditetapkan kemiskinan ekstrim	Dinas Sosial
			Pengembangan Pelayanan Informasi Pemasaran	15 Kabupaten/ Kota (kopi, lada, minyak goreng/CPO, tandan buah segar, kelapa sawit, kakao, tebu/gula pasir, kelapa dalam) pada tingkat produsen, pedagang, pengumpul/pengecer, dan pedagang besar.	15 Kabupaten/Kota (kopi, lada, minyak goreng/CPO, tandan buah segar, kelapa sawit, kakao, tebu/gula pasir, kelapa dalam) pada tingkat produsen, pedagang, pengumpul/pengecer, dan pedagang besar.	15 Kabupaten/Kota (kopi, lada, minyak goreng/CPO, tandan buah segar, kelapa sawit, kakao, tebu/gula pasir, kelapa dalam) pada tingkat produsen, pedagang, pengumpul/pengecer, dan pedagang besar.	Dinas Perkebunan
			Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan	12 Bulan penetapan TBS kelapa sawit pada sentra komoditas kelapa sawit (kabupaten mesuji, way kanan, lampung tengah, tulang bawang, tulang bawang barat, dan lampung utara)	12 Bulan penetapan TBS kelapa sawit pada sentra komoditas kelapa sawit (kabupaten mesuji, way kanan, lampung tengah, tulang bawang, tulang bawang barat, dan lampung utara)	12 Bulan penetapan TBS kelapa sawit pada sentra komoditas kelapa sawit (kabupaten mesuji, way kanan, lampung tengah, tulang bawang, tulang bawang barat, dan lampung utara)	Dinas Perkebunan
			Bazar Produk Peternakan	Terlaksananya bazar produk peternakan 2 kali dalam satu tahun	Terlaksananya bazar produk peternakan 4 kali dalam satu tahun	Terlaksananya bazar produk peternakan 6 kali dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Keswan

			Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium (KPSH-BM)	Pelaksanaan KPSH-BM sebanyak 28.000 ton beras medium	Pelaksanaan KPSH-BM sebanyak 28.000 ton beras medium	Pelaksanaan KPSH-BM sebanyak 28.000 ton beras medium	BULOG Divre Lampung
			Pasar Murah Bersubsidi	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga 5 kali dalam 1 tahun	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga 6 kali dalam 1 tahun	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga 6 kali dalam 1 tahun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Operasi Pasar Bahan Pokok	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi harga 2 kali dalam satu tahun	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi harga 4 kali dalam satu tahun	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi harga 4 kali dalam satu tahun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga distribusi pangan sebanyak 30 (tiga puluh) poktan/gapoktan	1. Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga distribusi pangan sebanyak 30 (tiga puluh) poktan/gapoktan	1. Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga distribusi pangan sebanyak 30 (tiga puluh) poktan/gapoktan	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2. Terpantaunya harga pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam, Daging Sapi, Cabai Merah, Cabai Rawit Merah, Telur, Minyak Goreng, Terigu dan Gula) di 15 Kab/Kota	2. Terpantaunya harga pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam, Daging Sapi, Cabai Merah, Cabai Rawit Merah, Telur, Minyak Goreng, Terigu dan Gula) di 15 Kab/Kota	2. Terpantaunya harga pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam, Daging Sapi, Cabai Merah, Cabai Rawit Merah, Telur, Minyak Goreng, Terigu dan Gula) di 15 Kab/Kota	
			Pemantauan Harga Harian dan Aplikasi SIGAP	Tersedianya Data Harga Bapok pada Aplikasi SP2KP dan SIGAP pada setiap hari kerja	Tersedianya Data Harga Bapok pada Aplikasi SP2KP dan SIGAP pada setiap hari kerja	Tersedianya Data Harga Bapok pada Aplikasi SP2KP dan SIGAP pada setiap hari kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	Perluasan Adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan melalui : 1. Penyempurnaan bisnis model 2. Penguatan/replikasi pada UMKM binaan ★	Tersedianya model bisnis 5 UMKM	7 UMKM	10 UMKM	Bank Indonesia
			Sikomandan	Target akseptor 200.000 ekor	Target akseptor 200.000 ekor	Target akseptor 200.000 ekor	Dinas Peternakan dan Keswan

			Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	Terlaksananya kegiatan pemantauan terhadap sumber daya pangan sebanyak 15 (lima belas) komoditas	Terlaksananya kegiatan pemantauan terhadap sumber daya pangan sebanyak 15 (lima belas) komoditas	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pemberian bantuan bibit kegiatan pengembangan pekarangan pangan kepada 58 (lima puluh delapan) kelompok	Terlaksananya pemberian bantuan bibit kegiatan pengembangan pekarangan pangan kepada 58 (lima puluh delapan) kelompok	Terlaksananya pemberian bantuan bibit kegiatan pengembangan pekarangan pangan kepada 58 (lima puluh delapan) kelompok	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya kegiatan pengawasan ke kelompok penerima pupuk, alsintan dan sarana pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok	Terlaksananya kegiatan pengawasan ke kelompok penerima pupuk, alsintan dan sarana pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok	Terlaksananya kegiatan pengawasan ke kelompok penerima pupuk, alsintan dan sarana pendukung sebanyak 30 (tiga puluh) kelompok	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan di Balai Benih Induk Tanaman Pangan seluas 15 (lima belas) Ha	Terlaksananya kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan di Balai Benih Induk Tanaman Pangan seluas 15 (lima belas) Ha	Terlaksananya kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan di Balai Benih Induk Tanaman Pangan seluas 15 (lima belas) Ha	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan pengembangan bibit tanaman hortikultura di Balai Benih Induk Hortikultura sebanyak 11.000 batang	Terlaksananya kegiatan pengembangan bibit tanaman hortikultura di Balai Benih Induk Hortikultura sebanyak 11.000 batang	Terlaksananya kegiatan pengembangan bibit tanaman hortikultura di Balai Benih Induk Hortikultura sebanyak 11.000 batang	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Pengembangan Lumbung Pangan (food estate) melalui peningkatan: Produksi pangan/horti)★	Terlaksananya kegiatan pengembangan lumbung pangan (Food Estate) melalui peningkatan produksi pangan/horti. Bawang merah 9 (sembilan) Ha dan Cabai 10 (sepuluh) Ha.	Terlaksananya kegiatan pengembangan lumbung pangan (Food Estate) melalui peningkatan produksi pangan/horti. Bawang merah 10 (sepuluh) Ha dan Cabai 12 (dua belas) Ha	Terlaksananya kegiatan pengembangan lumbung pangan (Food Estate) melalui peningkatan produksi pangan/horti. Bawang merah 2 (dua belas) Ha dan Cabai 15 (lima belas) Ha.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Meningkatnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar wilayah, melalui presentasi luas areal sawah daerah irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 sebesar 45%	Meningkatnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar wilayah, melalui presentasi luas areal sawah daerah irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 sebesar 50%	Meningkatnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar wilayah, melalui presentasi luas areal sawah daerah irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 sebesar 55%	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya 169.668,14 Ton	Produksi Perikanan Budidaya 187.442,89 Ton	Produksi Perikanan Budidaya 206.995,13 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 159.463,4 Ton	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 167.441,57 Ton	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 184.185,72 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang sebesar 90%	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang sebesar 95%	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang sebesar 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Eksport Perikanan 19.279,4 Kg	Volume Eksport Perikanan 20.725,4 Kg	Volume Eksport Perikanan 22.797,9 Kg	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	BPBD
		Pembinaan langsung ke kelompok terkait teknis pemeliharaan ternak	Terlaksananya Pembinaan di kelompok sapi 17 kelompok, kambing 53 kelompok, kelompok itik 50 kelompok, dan kelompok kelinci 1 kelompok	Terlaksananya Pembinaan di kelompok sapi 17 kelompok, kambing 53 kelompok, kelompok itik 50 kelompok, dan kelompok kelinci 1 kelompok	Terlaksananya Pembinaan di kelompok sapi 17 kelompok, kambing 53 kelompok, kelompok itik 50 kelompok, dan kelompok kelinci 1 kelompok	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pemberian bantuan ternak ke kelompok peternak pada kegiatan peningkatan populasi ternak	Terlaksananya pemberian bantuan ternak sapi sebanyak 170 ekor (17 kelompok), kambing 1060 ekor (53 kelompok), itik 5000 ekor (50 kelompok), kelinci 40 ekor (1 kelompok)	Terlaksananya pemberian bantuan ternak sapi sebanyak 170 ekor (17 kelompok), kambing 1060 ekor (53 kelompok), itik 5000 ekor (50 kelompok), kelinci 40 ekor (1 kelompok)	Terlaksananya pemberian bantuan ternak sapi sebanyak 170 ekor (17 kelompok), kambing 1060 ekor (53 kelompok), itik 5000 ekor (50 kelompok), kelinci 40 ekor (1 kelompok)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penyerapan Gabah/Beras sesuai Permendag No. 24 Tahun 2020 dalam rangka Penguatan Cadangan Beras Pemerintah	penyerapan 94.200 ton setara beras	penyerapan 94.200 ton setara beras	penyerapan 94.200 ton setara beras	BULOG

			Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Tertib Administrasi bagi Distributor dan Pengecer sejumlah 14 Kabupaten Kota @ 5 Distributor/Pengecer.	Tertib Administrasi bagi Distributor dan Pengecer sejumlah 14 Kabupaten Kota @ 5 Distributor/Pengecer.	Tertib Administrasi bagi Distributor dan Pengecer sejumlah 14 Kabupaten Kota @ 5 Distributor/Pengecer.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya pembinaan terhadap lumbung pangan sebanyak 30 (tiga puluh) unit	Terlaksananya pembinaan terhadap lumbung pangan sebanyak 30 (tiga puluh) unit	Terlaksananya pembinaan terhadap lumbung pangan sebanyak 30 (tiga puluh) unit	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) berupa beras sebanyak 11 (sebelas) Ton	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) berupa beras sebanyak 19 (sembilan belas) Ton	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) berupa beras sebanyak 19 (sembilan belas) Ton	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Mekanisme Ekspor Impor	Sertifikasi NKV	Terlaksananya sertifikasi NKV 7 unit usaha	Terlaksananya sertifikasi NKV 10 unit usaha	Terlaksananya sertifikasi NKV 10 unit usaha	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat	Terlaksananya kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat	Terlaksananya kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah sebanyak 15 (lima belas) sertifikat	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penguatan Kelembagaan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Sasaran Programnya Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi, Indikatornya adalah Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar 14,15 Persen	Sasaran Programnya Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi, Indikatornya adalah Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar 21,23 Persen	Sasaran Programnya Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi, Indikatornya adalah Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar 23,58 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Sasaran Program Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi, Indikatornya Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan	Sasaran Program Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi, Indikatornya Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan	Sasaran Program Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi, Indikatornya Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

				dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar 26,55 persen	dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar 26,55 persen	dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar 26,55 persen	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Sasaran Program Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil, Indikator Kinerjanya Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil sebesar 0,5	Sasaran Program Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil, Indikator Kinerjanya Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil sebesar 0,5	Sasaran Program Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil, Indikator Kinerjanya Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil sebesar 0,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan kerja dan produktivitas yang bersertifikat 100%	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan kerja dan produktivitas yang bersertifikat 100%	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan kerja dan produktivitas yang bersertifikat 100%	Dinas Tenaga Kerja
			Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja 65 %	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja 70 %	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja 75 %	Dinas Tenaga Kerja
			1000 desa sapi	Penjualan 500 sapi bakalan	Penjualan 1000 sapi bakalan (500 sapi bakalan/periode, 1 tahun ada 2 kali periode)	Penjualan 1000 sapi bakalan (500 sapi bakalan/periode, 1 tahun ada 2 kali periode)	Dinas Peternakan dan Keswan
			Klaster Peternakan	Satu (1) komoditas ternak	Satu (1) komoditas ternak	Satu (1) komoditas ternak	Dinas Peternakan dan Keswan
			Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terhadap poktan/gapoktan sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok	Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terhadap poktan/gapoktan sebanyak 30 (tiga puluh) kelompok	Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terhadap poktan/gapoktan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kelompok	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sebanyak 2 (dua) kelompok	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sebanyak 2 (dua) kelompok	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sebanyak 2 (dua) kelompok	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.	Kelancaran Distribusi	Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) ★	Kenaikan 10% jumlah KAD; dan/atau penambahan jenis komoditas dan/atau volume transaksi setiap tahun	Kenaikan 10% jumlah KAD; dan/atau penambahan jenis komoditas dan/atau volume transaksi setiap tahun	Kenaikan 10% jumlah KAD; dan/atau penambahan jenis komoditas dan/atau volume transaksi setiap tahun	- Bank Indonesia - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

				Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 156 unit	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 600 unit	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 700 unit	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional 2 Kapal Bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam rangka membuka konektivitas antar Daerah di Provinsi Lampung	Operasional 3 Kapal Bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam rangka membuka konektivitas antar Daerah di Provinsi Lampung	Operasional 3 Kapal Bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam rangka membuka konektivitas antar Daerah di Provinsi Lampung	Dinas Perhubungan
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian untuk 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian untuk 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian untuk 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Kajian Investasi Kapal Penyeberangan rute Bakauheni - Merak 1 dokumen	Pelaksanaan Investasi Kapal Penyeberangan rute Bakauheni - Merak 1 kegiatan	Pelaksanaan Investasi Kapal Penyeberangan rute Bakauheni - Merak 1 kegiatan	Dinas Perhubungan
4.	Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan nasional : Data Pasokan, Korelasi data harga dengan inflasi	Publikasi Min 0,8/tahun	Evaluasi Kesenambungan	Evaluasi dan pemanfaatan untuk asesmen	Bank Indonesia
			Publikasi Pengendalian Inflasi	1. Harga Pangan Strategis (PIHPS) 48 kali 2. Kebijakan TPID 2 kali 3. Kegiatan TPID 48 kali	1. Harga Pangan Strategis (PIHPS) 48 kali 2. Kebijakan TPID 2 kali 3. Kegiatan TPID 48 kali	1. Harga Pangan Strategis (PIHPS) 48 kali 2. Kebijakan TPID 2 kali 3. Kegiatan TPID 48 kali	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Monitoring Perkembangan data harga komoditas pangan tingkat petani dan eceran setiap hari selama 12 bulan	Terlaksananya monitoring Perkembangan Data Harga Komoditas Peternakan tingkat petani dan eceran setiap hari selama 12 bulan di 15 kab/kota	Terlaksananya monitoring Perkembangan Data Harga Komoditas Peternakan tingkat petani dan eceran setiap hari selama 12 bulan di 15 kab/kota	Terlaksananya monitoring Perkembangan Data Harga Komoditas Peternakan tingkat petani dan eceran setiap hari selama 12 bulan di 15 kab/kota	Dinas Peternakan
			Supply Demand HBKN Idul Fitri, Idul Adha dan Nataru	Tersedianya data Permintaan, Ketersediaan dan stok bahan pangan produk peternakan menjelang HBKN di 15 kab/kota	Tersedianya data Permintaan, Ketersediaan dan stok bahan pangan produk peternakan menjelang HBKN di 15 kab/kota	Tersedianya data Permintaan, Ketersediaan dan stok bahan pangan produk peternakan menjelang HBKN di 15 kab/kota	Dinas Peternakan

			Kampanye gizi	Terlaksananya kampanye gizi di 4 lokasi kab/kota	Terlaksananya kampanye gizi di 5 lokasi kab/kota	Terlaksananya kampanye gizi di 5 lokasi kab/kota	Dinas Peternakan
			Isikhnas	Tersediaanya data penyakit umum, penyakit prioritas dan target Sikomanda meliputi IB, PKB dan kelahiran di 15 kab/kota	Tersediaanya data penyakit umum, penyakit prioritas dan target Sikomanda meliputi IB, PKB dan kelahiran 15 kab/kota	Tersediaanya data penyakit umum, penyakit prioritas dan target Sikomanda meliputi IB, PKB dan kelahiran 15 kab/kota	Dinas Peternakan
			Penanganan Kerawanan Pangan	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) sebanyak 1 (satu) laporan	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) sebanyak 1 (satu) laporan	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) sebanyak 1 (satu) laporan	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Koordinasi Pusat dan Daerah	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rapat Koordinasi 3 kali, High Level Meeting 1 kali, Capacity Building 1 kali, Rapat Teknis 3 kali	Rapat Koordinasi 3 kali, High Level Meeting 1 kali, Capacity Building 1 kali, Rapat Teknis 3 kali	Rapat Koordinasi 3 kali, High Level Meeting 1 kali, Capacity Building 1 kali, Rapat Teknis 3 kali	- Biro Perekonomian - Bank Indonesia
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	BAPPEDA
		Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya: CF terjaga di kisaran sasaran inflasi★	3 ± 1 %	3 ± 1 %	2.5 ± 1 %	Bank Indonesia

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

			Kampanye gizi	Terlaksananya kampanye gizi di 4 lokasi kab/kota	Terlaksananya kampanye gizi di 5 lokasi kab/kota	Terlaksananya kampanye gizi di 5 lokasi kab/kota	Dinas Peternakan
			Isikhnas	Tersediaanya data penyakit umum, penyakit prioritas dan target Sikomanda meliputi IB, PKB dan kelahiran di 15 kab/kota	Tersediaanya data penyakit umum, penyakit prioritas dan target Sikomanda meliputi IB, PKB dan kelahiran 15 kab/kota	Tersediaanya data penyakit umum, penyakit prioritas dan target Sikomanda meliputi IB, PKB dan kelahiran 15 kab/kota	Dinas Peternakan
			Penanganan Kerawanan Pangan	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) sebanyak 1 (satu) laporan	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) sebanyak 1 (satu) laporan	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) sebanyak 1 (satu) laporan	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Koordinasi Pusat dan Daerah	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rapat Koordinasi 3 kali, High Level Meeting 1 kali, Capacity Building 1 kali, Rapat Teknis 3 kali	Rapat Koordinasi 3 kali, High Level Meeting 1 kali, Capacity Building 1 kali, Rapat Teknis 3 kali	Rapat Koordinasi 3 kali, High Level Meeting 1 kali, Capacity Building 1 kali, Rapat Teknis 3 kali	- Biro Perekonomian - Bank Indonesia
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	BAPPEDA
		Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya: CF terjaga di kisaran sasaran inflasi★	3 ± 1 %	3 ± 1 %	2.5 ± 1 %	Bank Indonesia

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI